

Implementasi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

Marta Jaya¹, Maemonah¹

¹Universitas Islam Negara Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia. Email:
marta.jaya010100@gmail.com

ABSTRACT

Minimum Capability Assessment (AKM), is the latest innovation from the Ministry of Education and Culture as a substitute for the National Examination (UN). Whether this activity will succeed on target and be able to boost the quality of Indonesian education at the global level, all depends on how the Ministry of Education and Culture implements the mission of the AKM activity. This article is about to discuss the Implementation of the Minimum Competency Assesment at which is currently being carried out, related to theories regarding the implementation of a policy. This research uses a qualitative descriptive approach, with a question and answer method. The research results prove that the implementation of the AKM skills socialization can be applied at. Success of socialization Implementation of a policy will be successful if it starts with communication in the form of socialization which involves all parties, and is regulated in a mature way and full planning.

Keywords : Assesment, Policy, Implementation

ABSTRAK

Asesmen Kemampuan Minimal(AKM), ialah inovasi terkini dari kemendikbud selaku pengganti Ujian Nasional(UN). Apakah aktivitas ini hendak berhasil tepat target serta sanggup mendograk kualitas pendidikan Indonesia di tingkatan Global, semua tergantung dari bagaimana kemendikbud menerapkan misi aktivitas AKM. Artikel ini hendak mangulas Implementasi Asasmen Kompetensi Minimal yang disaat ini sedang dilakukan, berhubungan dengan teori- teori mengenai implementasi suatu kebijakan. Penelitian memakai pendekatan deskriptif kualitatif, dengan metode tanya jawab. Hasil riset membuktikan jika implementasi sosialisasi kebijaksanaan AKM telah sanggup diaplikasikan. Kesuksesan sosialisasi Implementasi kebijakan hendak sukses bila dimulai dengan komunikasi pada bentuk sosialisasi yang mengaitkan seluruh pihak, serta diatur dengan cara matang serta penuh pemograman.

Kata Kunci: Asesmen, Kebijakan, Implementasi

1. PENDAHULUAN

Sesudah dilantik selaku menteri pendidikan dan kebukemampuan, Nadiem mengeluarkan suatu Kebijakan terkini ialah Merdeka Belajar, diantara isinya yakni menghilangkan aktivitas penilaian Ujian Nasional(UN), akhirnya

hendak dirubah memakai kebijakan lain dalam wujud Assesmen Kemampuan Minimal(AKM). Perihal ini dicoba lantaran pemerintah menyangka suatu Ujian Nasional kurang maksimal untuk memperbaiki mutu pendidikan dengan nasional. Kebijakan ini tentulah disambut seluruh golongan secara baik, paling utama adalah orangtua peserta didik, suatu inovasi berani, dimana lebih dahulu penghapusan ataupun meniadakan UN amat susah.(Afista, & Huda, 2020). Saat Mahkamah Agung menolak pengajuan kasasi yang di usulkan pihak pemerintah terpaut penerapan UN, memakai sebutan lain jika UN yang selama ini dilaksanakan cacat hukum dan UN dilarang diselenggarakan, kendati kasasi ditolak namun aktivitas UN tetap terus dilaksanakan. Alibi UN permanen dilaksanakan, suatu tetapan MA yang mencegah penerapan UN tidak mensugesti penyelenggaraan UN di 2010.“ Kita tetap menyelenggarakan UN di 2010 berbarengan dengan agenda yang diresmikan, dan perihal itu pula telah diatur pada Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 Mengenai standar Nasional Pendidikan”, begitu yang di informasikan oleh salah seorang anggota BNSP.

Penerapan ataupun aplikasi Kebijaksanaan penyelenggaraan kegiatan Ujian Nasional berjalan jauh dan penuh polemik, antara penguasa dalam hal ini kementerian pendidikan serta kebukemampuan dengan para eksekutif lapangan, antara lain orangtua peserta didik, peserta didik(Zaini, 2011). Polemik juga berlangsung, sebab dari tahun 2003, nilai UN dijadikan sebagai kriteria kelulusan, serta dasar guna meneruskan ke tingkatan pendidikan berikutnya. Walaupun tahun 2015, nilai UN tidak lagi dijadikan pemastian kelulusan, namun UN masih senantiasa jadi sesuatu yang mengerikan, membentangkan.

Kementerian pendidikan dan kebudayaan selanjutnya membuahkan kebijaksanaan terkini berlaku seperti pengganti UN yakni melampaui AKM. Kebijaksanaan ini lagi dalam tataran anjuran, apakah besok di tataran aplikasi ataupun aplikasi, mengundang pro- kontra, dimana arus penolakannya lebih besar dari yang menyongsong Kebijaksanaan AKM, ataukah kebalikannya, lebih banyak yang mensupport Kebijaksanaan itu, dibandingkan dengan menyangkal nya(Herizal, 2021). Penerapan sesuatu Kebijaksanaan pada pada kondisi analisa kebijaksanaan khalayak, masuk dalam jenjang aplikasi kebijaksanaan. Bila ditinjau dari permasalahan aktivitas UN, implementasinya atau pelaksanaannya penuh penuh dengan luapan penolakan yang berkelanjutan, namun konsisten saja kebijaksanaan itu diterapkan.

Dari pemaparan filosofi dan opini diatas, peeneliti melaksanakan riset dengan judul Iplementasi Asesmen Kompetensi Minimal(AKM) pada Mata pelajaran PAI

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif. Adapun metode yang digunakan yaitu metode interaktif, observasi, dan studi literatur. Teknik analisis data yang digunnakan pada penelitian ini yaitu analisis deksriptif, eksploratif, dan triangulasi data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

Kebijakan yang dianjurkan oleh penentu Kebijakan(policy makers), tidak menjamin kalau satu kebijakan itu hendak sukses diterapkan dalam hal pelaksanaan nya dilapangan, banyak perihai yang memengaruhi kesuksesan implementasi suatu kebijakan, baik dengan cara perseorangan, golongan, ataupun institusi.

Kesuksesan implementasi kebijakan bukan diamati berawal disiplin para pelaksana implementasi kebijakan, namun ditatap berawal dampak ataupun impak yang disebabkan asal implementasi kebijakan kepada implementer atau sering juga disebut pelaksana kebijakan, seperti dalam kaitan nya mengubah UN dengan asesmen nasional, yang mempunyai misi sebagai barometer kualitas pendidikan dalam seluruh sekolah dan perguruan tinggi, dan jadi program pemerataan tahapan bawah dan menengah. Apakah implementasi AKM sanggup mengurai benang kusut yang selaku pemicu keterpurukan kualitas pendidikan di Indonesia, ataupun cuma suatu cetak biru mendekati aktivitas UN, yang menyerap anggaran cukup besar tanpa berakibat dalam kenaikan kualitas pendidikan.

Erwan dan Dyah (2015), mendeskripsikan sesuatu cara pelaksanaan kebijakan diawali dari tujuan sesuatu kebijakan, guna menggapai misi mulianya, sehingga sesuatu kebijakan menginginkan arahan dalam menentukan sebuah kebijakan(policy input), diantaranya yakni berbentuk perkiraan. Arahan-arahan itupun kemudian akan diolah serta diramu untuk menjadi sesuatu produk kebijaksanaan(policy output), atau pada bahasa sederhananya, luaran Kebijakan ialah instrumen Kebijakan untuk menciptakan tujuan- misi kebijaksanaan yang sudah ditetapkan. Berikutnya policy output direalisasikan pada kalangan target, alhasil membuat outcome.

Selanjutnya, proses implemementasi jadi kewajiban implementing biro(forum yang memiliki wewenang untuk menerapkan kebijakan), di masa sebelumnya implementing biro penting dicoba oleh birokrasi pemerintah ataupun administrator, setelah itu mengerahkan sumberkemampuan manusia, implementing biro tidak selaku monopoly pemerintah, sebab keterbatasan berbagai macam berbagai perihai, mendekati anggaran, teknologi dan kapasitas pengelolaan untuk membongkar bersandar masalah, juga desakan demokrasi, menyebabkan pemerintah terus menjadi transparant serta memberikan kesempatan untuk kalangan *civil society organization* dan zona swasta.

Kekalutan penerapan metode kebijakan, bisa membuahkan ketidak berhasilan sesuatu kebijakan, alhasil kebijakan tidak terealisasi serupa misi awal mulanya atau kebijaksanaan itu tidak membagikan dampak dari sasaran sesungguhnya. Makinde(2005) mengidentifikasikan perseteruan- konfrontasi yang kelompokbul di negeri bertumbuh, misalnya di Nigeria. Kekalahan

aplikasi kebijaksanaannya diakibatkan 1) golongan target tidak turut dan pada aplikasi aktivitas, 2) kegiatan yang dilaksanakan tidak memperhatikan kondisi sosial, ekonomi serta politik daerah 3) terdapat kecurangan, 4) Kapasitas manusia yang rendah, serta 5) tidak adanya pengawasan yang jelas.

Terdapat 6 pandangan yang jadi determinan kandas tidaknya cara aplikasi kebijaksanaan, ialah:

1) Kualitas Kebijakan itu sendiri, antara lain; kejelasan tujuan, kejelasan implementor atau penjamin jawab. Bagi de Leon(2002), mutu dari Kebijaksanaan hendak amat didetetapkan dalam dikala formulasi kebijaksanaan, kala dirumuskan dengan metode demokratis, alhasil akan bagikan peluang didapat Kebijaksanaan yang baik.

2) Berkecukupan input Kebijaksanaan(sangat penting perhitungan). Bagi Wildavsky(1979), besarnya perhitungan yang dialokasikan pada sesuatu Kebijaksanaan membagikan seberapa akbar political will penguasa pada kasus yang akan dipecahkan. Bisa dikatakan besarnya jadikan perhitungan membagikan komitmen besar penguasa pada Kebijaksanaan itu, serta peluang keberhasilannya pula besar.

3) Kesesuaian instrumen yang dipakai dalam mencapai tujuan kebijaksanaan(pelayanan, dorongan, hadiah serta yang lain.

4) Kapasitas implementor(wujud golongan, sokongan sdm, koordinasi, pengawasan serta lain- lain).

5) Kepribadian serta sokongan golongan sasaran, amat pengaruhi pada metode aplikasi Kebijaksanaan. Golongan sasaran dimaksud, ilustrasinya apakah orang, atau sekumpulan, petrempuan atau, berpendidikan atau tidak berpendidikan, serta lain- lain.

6) Determinasi area geografis, sosial, ekonomi serta politik di mana implemetasi itu dicoba.

AKM jadi Kebijaksanaan terbaru dari Menteri Pendidikan, akan mengukur daya literasi membaca serta numerasi, yakni daya berasumsi serta literasi, serta daya memilah dengan mempraktikkan konsep hitungan dalam sesuatu situasi, bagus yang berbentuk abstrak ataupun faktual. Mengenai ini berkaitan berbarengan dengan dorongan desakan masa 21, dimana literasi ialah salah satu kompetensi atau daya yang harus dimengerti peserta didik, biar bisa bersaing di era revolusi industry 4. 0.

Pelaksanaan AKM diawali dengan pengenalan tujuan AKM, salahsatu sebab AKM yakni buat mengatasi kemunduran kualitas pendidikan Indonesia, berdasarkan nilai pemerolehan Pisa jadi indikator mutu pendidikan sesuatu negeri. AKM tidak memperkirakan kelulusan partisipan ajar, namun penekanannya buat mengukur daya sekolah dalam mempersiapkan siswanya supaya bisa ikut berkompetisi dunia global, dalam menyongsong kecakapan masa 21, dimana literasi membaca serta numerasi jadi bagian dari indikator pemastian kualitas pendidikan itu sendiri. *World Economic forum*(2015) menyudahi 6 literasi dasar, yakni literasi (a) baca tulis,(b) numerasi,(c) ilmu,(d) digital,(e) finansial, serta(f) adat serta kewargaan.

Tahap kedua, terkait kecukupan input atau perhitungan yang digelontorkan buat kegiatan AKM ini agaknya tidak jadi hambatan, sangat penting pengenalan menggunakan perlengkapan internet, dirasa lebih berdaya guna serta berdaya untuk dalam mengimplementasi sesuatu Kebijakan. AKM yang mulai diterapkan di tahun 2021, Kemendikbud sudah mensosialisasikan dikala aplikasi UN terakhir diselenggarakan, pada tahun 2019, dengan memuat soal- pertanyaan AKM jadi bentuk pengenalan ke bawah pendidikan, sangat penting daya pendidikan bawah serta menengah.

Tahap ketiga, artinya ketepatan instrumen yang digunakan buat mencapai tujuan Kebijakan, pada Mengenai Kebijakan AKM, instrument yang dipergunakan telah cocok, ilustrasinya mengenakan kegiatan-kegiatan pelayanan pada mensosialisasikan program AKM telah dicoba melampaui sebagian perlengkapan. kegiatan training salah satu bentuk instrument yang dicoba kemendikbud, mengenakan melatih para penyedia wilayah, buat sosialisasi AKM ke sekolah- sekolah.

Tahap keempat, penyiapan kapasitas pelaksanaan, yakni daya para stakeholder yang berkaitan mengenakan aplikasi AKM. Kemendikbud, melampaui dirjen kemdikbud dan jajaran, melalui dinas pendidikan provinsi, serta kota, dikdasmen, berangkaian menerapkan aplikasi dalam para kepala sekolah dengan metode sedikit untuk sedikit, melampaui fasilitator implementator AKM yang profesional. Disamping itu, dalam pengajar- guru di bawah pendidikan, ditawarkan bimtek- bimtek dengan metode mandiri serta virtual. Tahapan ini kemudian dicoba dari menjangkau tahun anutan 2020- 2021. Tahapan- jenjang ini dibantu mengenakan respon positif dari sekolah- sekolah, bagus itu dari arahan sekolah, guru, ataupun partisipan ajar.

3.2 Proses Implementasi Asesmen Kompetensi Minimum Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

Pelaksanaan Kebijakan AKM bisa berjalan mudah, karena telah dimulai dengan penyampaian informasi ataupun aktivitas sosialisasi pada golongan target. Tujuannya supaya golongan sasaran menguasai Kebijakan yang hendak diimplementasikan, alhasil mereka dapat ikut serta aktif pada usaha menciptakan tujuan- tujuan Kebijakan. Data yang di informasikan antara lain melingkupi uraian dengan cara komplit Mengenai; a) misi Kebijakan, b) manfaat dan keuntungan, c) stakeholder yang ikut serta, dan d) metode kegiatan suatu kegiatan ataupun Kebijakan.

Kegiatan penyampaian data ataupun identifikasi kegiatan AKM, dicoba melewati 2 program, dengan cara khusus dan tidak individu. Dengan cara khusus Menteri mengantarkan ceramah dengan cara virtual yang diunggah dalam chanel Youtube ataupun halaman kemendikbud, percakapan interaktif dalam webinar- webinar yang diselenggarakan kemendikbud, langsung kepada kepala sekolah, melewati biro pendidikan di tingkatan provinsi, daerah atau

derajat kota- kabupaten. Sosialisasi AKM dengan cara tidak langsung dicoba mengenakan media cetak tentang AKM, chanel youtube, informasi grafis, web, medsos.

Aktivitas pengenalan di era demokrasi, memandang suatu masyarakat tidak berkepribadian pasif, serta kalangan sasaran bukan sesuatu obyek Kebijaksanaan, hasilnya dapat dikatakan suatu masyarakat ataupun golongan target dilibatkan dengan metode aktif pada masing- masing formulasi, alhasil guna menciptakan *good governance* dapat terealisasi, yakni dengan kesertaan pemerintah, warga serta pihak swasta pada pembuatan Kebijaksanaan, alhasil rancangan pemasyarakatan khalayak memerlukan diganti dengan konsep dialog khalayak, yang membutuhkan adanya kesertaan masyarakat dengan metode aktif pada formulasi Kebijaksanaan.

Aktivitas diskusi publik kaitannya mengenai aktivitas AKM, agaknya sudah mulai dicoba kemendikbud, meski sasarannya belum seluruh stakeholder terlibat, sangat penting pihak- pihak swasta, aktivitas yang dicoba artinya berarti mendesak pihak sekolah dalam Mengenai ini para guru serta para arahan sekolah, buat mulai menyelidiki, memahami serta mempraktikkan metode aktivitas berlatih membimbing yang menekan partisipan ajar buat mempunyai kemampuan berasumsi besar. Sebab salah satu capaian keberhasilan AKM, yakni peserta didik memiliki daya energi akal besar, melewati literasi membaca serta numerasi.

Sesudah proses sosialisasi, sehingga aktivitas selanjutnya yakni *delivery activities*, yakni kegiatan buat memberikan *policy output* pada kalangan sasaran. Kegiatan dapat dibidang jadi aktivitas aplikasi Kebijaksanaan(Ripley 1985). Tujuan *delivery activities* artinya kehadiran *policy output* di golongan target. Bentuknya dapat pada pemberian jasa free, realisasi dorongan pada wujud sumbangan. *delivery activities* dapat dikatakan berhasil bila pe; ayanan bisa diperoleh dengan bagus, dengan lama penyampaian yang tepat, tepat jumlah serta mutu, serta tepat sasaran.

Delivery activities AKM, dalam dini nya akan dilaksanakan dekat bulan April, namun tertahan dengan suasana Covid, alhasil aktivitas AKM akan dilaksanakan di tahun anutan 2021- 2022, di semester aneh. Kala *policy output* telah hingga pada golongan target, alhasil bisa dibidang suatu Kebijaksanaan itu sudah menimbulkan effect atau initial outcome, yakni dampak spesial yang dialami golongan target dikala ada *delivery activities* suatu *policy output* dalam golongan target. Selanjutnya *policy output* dipakai oleh kelompok sasaran.

3.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Asesmen Kompetensi Minimum dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

Subarsono (2015) mengambil opini Edward III yang melaporkan bahwa implementasi Kebijakan dipengaruhi 4 variable antara lain;

- a. Komunikasi; kesuksesan implementasi Kebijakan meminta implementor mengenali apa yang wajib dicoba, apa yang jadi misi dan sasaran wajib ditransmisikan dalam sasaran. Bila target Kebijakan tidak jelas dan tidak

tersampaikan, sehingga mungkin hendak terjalin resistensi asal kelompok target.

- b. Sumber daya; bahkan jika kebijakan telah dikomunikasikan tetapi tidak ada sarana untuk mengimplementasikannya, implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya yang relevan adalah pengetahuan dan pembiayaan pelaksana.
- c. Diaposisi; maksudnya karakter yang dipunyai implementor, mendekati komitmen, kejujuran, watak demokratis. Bila implementor mempunyai catatan bagus, sehingga ia hendak melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan awal kebijakan ditetapkan, tetapi sebaliknya bila implementor mempunyai perspektif tidak serupa dengan pembuat Kebijakan, sehingga proses implementasi tidak akan berjalan secara efektif.
- d. Bentuk Birokrasi; bentuk kelompok yang bekerja menerapkan Kebijakan memiliki akibat yang penting kepada implementasi Kebijakan. keliru satu pandangan bentuk yang genting merupakan terdapatnya SOP yang jadi prinsip untuk pelaksana implemtasi dalam berperan (Subarsono, 2015).

Hingga saat ini, kelihatannya kemendikbud sudah sukses mengkomunikasikan arti dan misi AKM. kelihatannya semua pihak menyongsong bagus program AKM, sebab pemerintah dalam perihal ini kemendikbud, sanggup memastikan subyek AKM, jadi aktivitas yang mengaitkan siswa, tetapi hasilnya dipergunakan untuk mengukur tingkatan kualitas pendidikan. Sumberkemampuan pada mensosialisasikan implementasi AKM, kelihatannya telah mencukupi, dengan memberkemampukan sdm berpengalaman, yang dipunyai kemendikbud, antara lain para penyedia, para instruktur nasional yang dipunyai kemendikbud, yang berawal asal perwakilan- perwakilan kemampuan pengajar yang berpengalaman, memiliki kompetensi implementor besar.

3.4 Implementasi Asesmen Kompetensi Minimum dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

Usaha yang terpolakan dalam mempersiapkan peserta didik untuk memahami, menguasai, mendalami, hingga memercayai dan bertakwa dan bermoral agung dalam mengamalkan ajaran agama Islam, sehingga memakai itu disusunlah mata pelajaran agama Islam.

Kegiatan pembelajaran PAI dicoba melewati aktivitas edukasi, pembelajaran, bimbingan, dan pemakaian pengalaman supaya bisa bisa membimbing siswa untuk berkepribadian sesuai dengan nilai- nilai Islam ataupun adab Islam dan mengarahkan untuk menekuni modul anutan Islam. Inilah yang jadi alasan suatu modul PAI perlu dikembangkan dengan baik sebab terdapat dalam tujuan untuk pengembangan sikap siswa pada kehidupan keseharian nya, mendekati mengenai bagaimana sikap ataupun adab mukmin dalam menjalankan kiprah sosialnya. Untuk itu pandangan kiprah sosial seorang mukmin jadi amat genting agar bisa dibesarkan pada modul PAI yang wajib beradaptasi dengan kemajuan, kehidupan serta perkembangan sosial yang

dinamis tanpa harus kehilangan kekhususan esensial kaidah agama Islam itu sendiri.

Pembelajaran PAI juga wajib bisa menyesuaikan dan merespon gairah kemajuan yang terjalin dalam lingkungan instansi dan pemangku kebijakan pendidikan, yang dengan cara khusus di Indonesia ilustrasinya terpaut memakai program asesmen nasional oleh pemerintah melalui kemendikbud dalam penerapan asesmen nasional.

Pembelajaran PAI hendak dan terus dituntut guna mempertajam lagi implikasi kontekstual kaidah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist dengan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik, terlebih dengan pembangunan cirinya, tidak jarang kita temui suatu bacaan dalam Al-Qur'an dan Hadist yang menginginkan kemampuan literasi dan numerasi yang bagus agar peserta didik mampu memahami teks tersebut, terlebih lagi mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pembelajaran PAI begitu juga misi nya untuk usaha pembentukan karakter siswa yang berkhilaf sehingga tercermin dalam tingkah dan perlakuan nya. Sehingga pembelajaran PAI pastinya hendak memiliki kedudukan penting selaku agen pergantian psikologis dan perilaku dalam sesuatu sistem yang terencana dan berkepanjangan. Perihal ini dapat amat gampang dimengerti dari 2 aspek pembatas yang ada ialah;

- a. Sebab SDM Indonesia yang karekter adat serta budayanya merupakan religius.
- b. Masyarakat Indonesia adalah mayoritas Islam, sehingga jelas implikasinya, PAI di sekolah paling utama pada mata pelajaran akidah- akhlak yang terfokus pada pembentukan kepribadian peserta didik, sehingga butuh dipusatkan di pendekatan adaptasi supaya lebih efisien.

4. KESIMPULAN

Kerumitan implementasi Asesmen Kompetensi Minimal berdampak di kegagalan suatu Kebijakan, maksudnya Kebijakan tidak sukses menggapai misi. Kesuksesan implementasi Asesmen Kompetensi Minimal terkait asal aspek asal energi orang dan keuangan, disamping itu pemakaian instrument yang dicocokkan memakai tingkatan kemampuan penggunaanya. Implementasi Asesmen Kompetensi Minimal hendak sukses Bila dimulai memakai komunikasi dalam wujud identifikasi, membagikan misi Kebijakan, mengaitkan kelompok sasaran dan dukungan keuangan yang besar. Dissamping itu metode dan strategi- seni manajemen implentasi Kebijakan jadi suatu jemabatan untuk kesuksesan implementasi Kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Solihin, (2017), Analisis Kebijakan, BumiAksara, Jakarta
- Afista, Y., & Huda, S. A. A. (2020). Analisis kesiapan guru pai dalam menyongsong kebijakan merdeka belajar. *JoEMS (Journal of Education and Management Studies)*, 3(6), 53-60.
- Agus Purwanto Erwan dan Dyah Ratih S, (2015), Implementasi Kebijakan Publik, Gava Media, Yogyakarta
- Anonymous, (2020), Desain Pengembangan Soal AKM, Pusat Asesmen dan Pembelajaran, badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemedikbud.
- Anonymous, (2020), AKM dan Implikasi Pembelajaran, Pusat Asesmen dan Pembelajaran, badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemedikbud.
- Anonymous, (2020), Lembar Tanya Jawab tentang AN, Pusat Asesmen dan Pembelajaran, badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemedikbud.
- Fattah Nanang, (2012), Analisis Kebijakan Pendidikan, Rosda, Bandung
- Hadi, L. (2020). Pro dan Kontra Merdeka Belajar. *Jurnal ilmiah wahana pendidikan*, 6(4), 812-818.
- Lianingsih, f. *libas akm untuk SMP/MTs 2021: Latihan Soal dan Prediksi Berbasis Asesmen Kompetensi Minimum*. Penerbit Andi.
- Novita, N., Mellyzar, M., & Herizal, H. (2021). Asesmen Nasional (AN): Pengetahuan dan Persepsi Calon Guru. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(1).
- Sari, A., Daulay, S., Putri, Y. Y., & Epriani, P. (2021). Penghapusan Ujian Nasional Tahun 2021 Dalam Perspektif Guru SMA Di Kota Tebing Tinggi. In *Prosiding Seminar Nasional Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia (SemNas PBSI)-3* (pp. 213-220). FBS Unimed Press.
- Silverius, S. (2010). Kontroversi ujian nasional sepanjang masa. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 16(2), 194-205.
- Subarsono, (2015), Analisis Kebijakan Publik, Konsep, teori dan aplikasi, PustakaPelajar, Yogyakarta
- Zaini, M. (2011). Kebijakan ujian nasional Kajian Kritis Politik Pendidikan. *Jurnal Salam*, 13(1).